

MEMO HUKUM

UMI KUSTOWATI

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA LELANG

(STUDY TENTANG LELANG YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR LELANG SURABAYA
TANGGAL 30 MEI 1990 NOMOR 38/1990-1991)



KK.
Per. 2194/96
Kus
p

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA LELANG

(STUDY TENTANG LELANG YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR LELANG SURABAYA
TANGGAL 30 MEI 1990 NOMOR 36/1990-1991)



MEMO HUKUM

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

Pembimbing

SOEDALHAR, SH
Nlp. 130 162 049

Penyusun

UMI KUSTYOWATI
Nim. 039113286

E. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Surabaya adalah sah walaupun tidak memberikan sertifikat dari tanah yang dilelang kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagaimana ditentukan pasal 24 PP Nomor 10 Tahun 1961. Lelang tersebut telah memenuhi syarat-syarat konstitutif pelaksanaan lelang termasuk peralihan hak miliknya. Pendaftaran hak milik atas tanah yang diatur dalam pasal 24 PP 10/1961 bukan merupakan syarat konstitutif bagi terjadinya peralihan hak milik.
2. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan permohonan yang diajukan oleh Soesilo Soeprapto. Permohonan tersebut materinya tidak sesuai dengan materi yang dapat diajukan oleh pemohon yaitu hanya berupa "pernyataan" hukum mengenai kedudukan tertentu pemohon terhadap suatu keadaan tertentu.
3. Prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan secara lisan kepada Debitur pemegang sertifikat hak atas tanah. Apabila tidak berhasil dapat diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Setelah sertifikat tersebut diperoleh maka dapat dilakukan lagi pendaftaran peralihan hak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional.

SARAN

1. Pelaksanaan lelang harus memenuhi syarat-syarat konstitutif lelang. Termasuk didalamnya mengenai peralihan

hak miliknya serta pembuatan Risalah Lelang yang merupakan otentikasi dari lelang.

2. Hakim pada Pengadilan Negeri wajib memeriksa dengan cermat setiap perkara yang diajukan baik berupa gugatan maupun permohonan terutama berkaitan dengan materinya yang berhubungan dengan kompetensi absolut untuk mengadili dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
3. Pendaftaran peralihan hak atas tanah mutlak memerlukan sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu Soesilo Soeprapto harus berupaya baik secara damai maupun dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh sertifikat tersebut.